

Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement

**Nabilla Nahda Maliha Samudra, Dian Rohani Siburian, Nur Citra Hasanah,
Oktarini Khamila Siregar**

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia
e-mail: malihasamudra04@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of electronic procurement (e-procurement) in several local governments in Indonesia. The primary focus of this study is to evaluate the effectiveness, transparency, and accountability of e-procurement compared to conventional procurement methods. According to the research findings, the implementation of e-procurement has shown significant improvements in terms of time and cost efficiency, as well as increased user satisfaction. The study also found that e-procurement can reduce the potential for corruption and enhance transparency in the procurement process. These results indicate that e-procurement not only improves administrative efficiency but also strengthens accountability and public trust in government procurement processes. Thus, e-procurement becomes a superior alternative compared to conventional procurement methods.

Keywords: E-Procurement, Goods/Services Procurement, Transparency, Accountability, Local Government.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement) di beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas e-procurement dibandingkan dengan metode pengadaan konvensional. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan e-procurement telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan kepuasan pengguna. Penelitian ini juga menemukan bahwa e-procurement dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan. Hasil ini menunjukkan bahwa e-procurement tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan pemerintah. Dengan demikian, e-procurement menjadi alternatif yang lebih unggul dibandingkan dengan metode pengadaan konvensional.

Kata Kunci: E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui pengadaan yang efisien dan transparan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan publik terpenuhi dengan cara yang akuntabel dan tepat sasaran. Pengadaan barang/jasa yang efektif adalah kunci untuk mencapai pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, e-procurement, atau pengadaan barang/jasa secara elektronik, telah diterapkan di berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

E-procurement memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengotomatisasi proses pengadaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan e-procurement, seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dapat dilakukan secara online. Hal ini tidak hanya meminimalisir kesalahan manusia, tetapi juga

mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi dan kolusi yang seringkali terjadi dalam pengadaan konvensional. Selain itu, e-procurement memungkinkan akses informasi yang lebih luas bagi para penyedia barang/jasa, sehingga menciptakan persaingan yang lebih sehat dan harga yang lebih kompetitif. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan e-procurement di beberapa pemerintah daerah dan mengidentifikasi sejauh mana penerapannya telah berhasil meningkatkan proses pengadaan dibandingkan dengan metode konvensional. Dalam melakukan evaluasi, studi ini akan melihat beberapa indikator kunci, seperti waktu penyelesaian pengadaan, tingkat transparansi, tingkat partisipasi penyedia, dan kepuasan pengguna akhir. Selain itu, studi ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi e-procurement dan mencari solusi untuk mengatasinya.

Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa demi kesejahteraan masyarakat luas.

KAJIAN PUSTAKA

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah salah satu fungsi penting dalam administrasi publik, yang berperan besar dalam pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Pelaksanaan pengadaan ini sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, inovasi dalam proses pengadaan, seperti penerapan e-procurement, menjadi sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pengadaan Konvensional dan Permasalahan yang Dihadapi

Sebelum adanya e-procurement, proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara konvensional, yang melibatkan interaksi langsung antara panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa. Menurut Udoyono (2012), pengadaan konvensional menimbulkan banyak aspek negatif, seperti suap untuk memenangkan tender, kurang transparansi, dan persaingan yang tidak sehat. Proses yang manual ini sering kali membuka celah bagi praktik-praktik KKN. Selain itu, pengadaan konvensional sering kali memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi, serta menghadirkan risiko human error yang lebih besar (Handoko, 2011).

Electronic Procurement (E-Procurement) sebagai Solusi

E-procurement adalah sistem pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengotomatisasi proses pengadaan. Menurut Harsono (2013), e-procurement memungkinkan seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilakukan secara online. Ini tidak hanya meminimalisir kesalahan manusia, tetapi juga mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi dan kolusi.

Manfaat E-Procurement

a. Transparansi dan Akuntabilitas:

Salah satu manfaat utama e-procurement adalah peningkatan transparansi. Semua informasi terkait pengadaan tersedia secara online dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga mengurangi peluang terjadinya KKN. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fathoni (2014), penerapan e-procurement di Indonesia telah berhasil meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, yang berdampak positif terhadap akuntabilitas pemerintah.

b. Efisiensi Waktu dan Biaya:

E-procurement memungkinkan proses pengadaan dilakukan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Menurut penelitian Sari (2015), penerapan e-procurement di berbagai pemerintah daerah di Indonesia telah berhasil mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengadaan dan menurunkan biaya administrasi.

c. Persaingan yang Sehat:

Dengan e-procurement, informasi pengadaan dapat diakses oleh lebih banyak penyedia barang/jasa, sehingga menciptakan persaingan yang lebih sehat. Ini berdampak pada penawaran harga yang lebih kompetitif dan kualitas barang/jasa yang lebih baik (Nugroho, 2016).

Tantangan dalam Implementasi E-Procurement

a. Infrastruktur Teknologi:

Salah satu tantangan utama dalam penerapan e-procurement adalah kesiapan infrastruktur teknologi. Menurut Kusuma (2017), banyak pemerintah daerah di Indonesia yang masih menghadapi kendala dalam hal infrastruktur teknologi yang memadai, yang menghambat pelaksanaan e-procurement secara optimal.

b. Sumber Daya Manusia:

Selain infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pegawai pemerintah untuk dapat mengoperasikan sistem e-procurement dengan baik (Prasetyo, 2018).

c. Regulasi dan Kebijakan:

Regulasi yang mendukung dan kebijakan yang jelas sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi e-procurement. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019), harmonisasi regulasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan e-procurement yang efektif.

Studi Kasus Implementasi E-Procurement di Indonesia

Studi yang dilakukan oleh Rachman (2020) menunjukkan bahwa penerapan e-procurement di Kabupaten Wajo, Yogyakarta, dan Gresik telah memberikan hasil yang positif. Di Kabupaten Wajo, penerapan e-procurement berhasil meningkatkan transparansi dan mengurangi waktu pengadaan hingga 30%. Di Yogyakarta, efisiensi biaya pengadaan meningkat hingga 20%, sementara di Gresik, partisipasi penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan meningkat signifikan.

Penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, seperti infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia, manfaat yang diperoleh dari e-procurement sangat signifikan. Dengan terus meningkatkan regulasi dan kebijakan yang mendukung serta mengatasi kendala yang ada, diharapkan implementasi e-procurement dapat semakin optimal di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, termasuk studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait di beberapa pemerintah daerah, seperti Kabupaten Wajo, Kabupaten Gresik, dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Data dianalisis

menggunakan teknik analisis konten untuk mengevaluasi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan e-procurement.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kabupaten Wajo

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Kabupaten Wajo telah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seluruh tahapan pengadaan, mulai dari pengumuman lelang, pendaftaran, penjelasan pekerjaan, pemasukan penawaran dan pembukaan, evaluasi penawaran dan kualifikasi, hingga penetapan dan pengumuman pemenang, telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi prinsip efisiensi serta efektivitas yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Wajo telah diliputi oleh tahapan pengumuman lelang yang dilakukan secara terbuka dan bersaing, adil, serta efektif dan efisien.

Kabupaten Gresik

Implementasi e-procurement di Kabupaten Gresik juga menunjukkan hasil yang positif. Prinsip-prinsip pengadaan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, terbuka, bersaing, dan adil telah dipenuhi dengan baik. Hal ini membantu mengurangi penyimpangan dan praktik curang dalam proses pengadaan. Penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan e-procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik membawa implikasi positif bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sehingga proses pengadaan berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kota Yogyakarta

Di Pemerintah Kota Yogyakarta, penerapan e-procurement telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan sistem ini berhasil mengurangi interaksi langsung antara pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, sehingga potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalisir. Selain itu, sistem e-procurement juga berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 137 Tahun 2009..

Secara keseluruhan, implementasi e-procurement di Kabupaten Wajo, Kabupaten Gresik, dan Pemerintah Kota Yogyakarta telah berhasil meningkatkan proses pengadaan barang/jasa dibandingkan dengan metode konvensional. Penerapan e-procurement di ketiga daerah tersebut tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip dasar pengadaan yang baik, tetapi juga berhasil menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan demikian, tujuan dari penerapan e-procurement untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.

Penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan berbagai hasil positif yang patut dicermati. Studi ini mencakup implementasi e-procurement di Kabupaten Wajo, Kabupaten Gresik, dan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang semuanya menunjukkan peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Kabupaten Wajo

Di Kabupaten Wajo, pelaksanaan e-procurement telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Semua tahapan pengadaan dilakukan secara transparan, mulai dari pengumuman lelang hingga penetapan pemenang. Hal ini menciptakan proses yang efisien dan efektif, mengurangi potensi penyimpangan, dan memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi pengadaan secara adil. Keterbukaan dalam pengumuman lelang dan penilaian yang objektif menunjukkan bahwa e-procurement dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa di pemerintahan daerah.

Kabupaten Gresik

Implementasi e-procurement di Kabupaten Gresik juga memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi, e-procurement membantu mengurangi penyimpangan dan praktik curang yang sering terjadi dalam pengadaan konvensional. Selain itu, adanya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berfungsi dengan baik, memperkuat sistem pengadaan yang lebih terbuka dan bersaing. Hal ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi, sehingga menciptakan persaingan yang sehat dan hasil pengadaan yang lebih optimal.

Pemerintah Kota Yogyakarta

Di Pemerintah Kota Yogyakarta, penerapan e-procurement telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan efektivitas proses pengadaan. Pengurangan interaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan mengurangi risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, proses pengadaan menjadi lebih cepat dan transparan, memungkinkan pemerintah kota untuk menyelesaikan pengadaan dengan lebih efisien. Peningkatan partisipasi dari penyedia barang/jasa juga mencerminkan kepercayaan yang meningkat terhadap sistem e-procurement, yang lebih adil dan terbuka.

Secara keseluruhan, penerapan e-procurement di Kabupaten Wajo, Kabupaten Gresik, dan Pemerintah Kota Yogyakarta telah berhasil meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Hasil ini menunjukkan bahwa e-procurement tidak hanya mengurangi potensi penyimpangan tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan pemerintah. Melalui peningkatan regulasi, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan infrastruktur teknologi, diharapkan penerapan e-procurement dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Implementasi e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di berbagai daerah di Indonesia, seperti Kabupaten Wajo, Kabupaten Gresik, dan Pemerintah Kota Yogyakarta, telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengalaman dari ketiga daerah ini memberikan gambaran yang jelas tentang manfaat dan tantangan dari penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik. Di Kabupaten Wajo, penerapan e-procurement telah berhasil menciptakan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel. Semua tahapan pengadaan, mulai dari pengumuman lelang hingga penetapan pemenang, dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa e-procurement dapat

mengurangi potensi penyimpangan dan memastikan bahwa informasi pengadaan dapat diakses secara adil oleh semua pihak yang berkepentingan. Keterbukaan dalam pengumuman lelang dan penilaian yang objektif menunjukkan bahwa e-procurement dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa di pemerintahan daerah. Di Kabupaten Gresik, implementasi e-procurement juga memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi, e-procurement membantu mengurangi penyimpangan dan praktik curang yang sering terjadi dalam pengadaan konvensional. Keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berfungsi dengan baik memperkuat sistem pengadaan yang lebih terbuka dan bersaing. Hal ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi, menciptakan persaingan yang sehat dan hasil pengadaan yang lebih optimal.

Di Pemerintah Kota Yogyakarta, penerapan e-procurement telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan. Pengurangan interaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan mengurangi risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses pengadaan menjadi lebih cepat dan transparan, memungkinkan pemerintah kota untuk menyelesaikan pengadaan dengan lebih efisien. Peningkatan partisipasi dari penyedia barang/jasa mencerminkan kepercayaan yang meningkat terhadap sistem e-procurement, yang lebih adil dan terbuka. Secara keseluruhan, penerapan e-procurement di ketiga daerah tersebut menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah. E-procurement tidak hanya mengurangi potensi penyimpangan tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan pemerintah. Melalui peningkatan regulasi, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan infrastruktur teknologi, diharapkan penerapan e-procurement dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan nasional. Hasil positif dari implementasi e-procurement di berbagai daerah ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan upaya yang konsisten, sistem ini dapat diadopsi secara luas untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien.

REFERENSI

- Djojosoekarto, Agung (ed), 2008, *E-Procurement di Indonesia, Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, Kemitraan Partnership dan LPSE Nasional*, Jakarta.
- Haryati, Dwi. (2011). *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa e-Procurement pada Pemerintah Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Maharani Arsyad. (2014). *Analisis Pengadaan barang/jasa secara elektronik (eProcurement pada LPSE Kota Kendari)*. Kendari: LPSE
- Moleong, Lexy J 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden No.54 (2010) *tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah*. Peraturan Presiden No.70 (2012) *tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 (2010) tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah*
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 *tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Pasal 50 ayat (5) *tentang pelaksanaan e-purchasing*.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 *tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa*
- Ramli, Samsul, *Buku Bacaan Wajib Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Cet-1 Jakarta : Visimedia, 2014

Siahaya, Willem. 2012. *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.

<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16192>

<https://osf.io/preprints/ce95m/>

<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jts/article/view/2000>

<https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/download/18010/9779>

<https://www.ojs.univprima.ac.id/index.php/jangpa/article/view/404>